

TESIS

**PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN
PENYELIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

**RIVO ALFAJRI SYAH VIRDAN
221020518053**

Tesis Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA**

*LEGAL INTERPRETATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
REGARDING THE ABSENCE OF REGULATIONS ON TERMINATION OF
INVESTIGATIONS IN ACT NUMBER 8 OF 1981 CONCERNING CRIMINAL
PROCEDURE LAW*

**RIVO ALFAJRI SYAH VIRDAN
NPM : 221020518053**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
2024**

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN TESIS

Judul Tesis :


“PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”.

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 24 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 84 (delapan puluh empat) dan predikat CUM LAUDE.

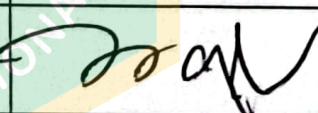
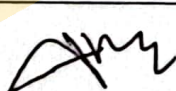
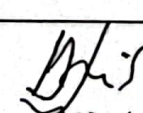
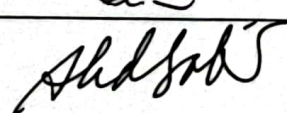
Jakarta, 28 Februari 2024

Mengetahui,

DekanPembimbing



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.) (Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.)

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Program Studi	Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.	
Sekretaris Program Studi	Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.	
Penguji I	Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.	
Penguji II	Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 22 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rivo Alfajri Syah Virdan

NPM 221020518053

ABSTRAK
Fakultas Hukum Universitas Nasional
Program Magister Hukum
Tesis, 22 Februari 2024

- A. Nama Penulis Tesis** : Rivo Alfajri Syah Virdan
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 221020518053
- C. Judul Tesis** : **Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketiadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**
- D. Jumlah Halaman** : 10 halaman dan 97 halaman
- E. Isi Abstrak** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diketahui tidak mengatur tentang penghentian penyelidikan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana fakta hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan No 4/PUU-XX/2022 tentang ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan; dan (2) bagaimana penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan No 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan No 4/PUU-XX/2022. Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui: (1) fakta hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan No 4/PUU-XX/2022 tentang ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan; dan (2) penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan No 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan No 4/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Putusan MK No 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No 4/PUU-XX/2022 merupakan perkara yang masing-masing menguji secara materiil norma pada Pasal 77 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana keduanya ditolak secara seluruhnya oleh Hakim; dan (2) Hakim pada Putusan No 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan No 4/PUU-XX/2022 menggunakan 3 (tiga) teori penafsiran hukum yaitu penafsiran hukum histori, penafsiran hukum teleologis, dan penafsiran hukum holistik tematis-sistematis yang kemudian menentukan bahwa ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan telah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.
- Kata Kunci: penafsiran hukum, hukum acara pidana, penyelidikan.*
- F. Daftar Pustaka** : 27 Buku, 3 Perundang-undangan, 4 Putusan Pengadilan, 9 Jurnal, 1 Disertasi, dan 1 Website
- G. Nama Dosen Pembimbing:** Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.

ABSTRACT
National University Faculty of Law
Master of Laws Program
Thesis, 22 February 2024

- A. Writer's Name** : Rivo Alfajri Syah Virdan
- B. Student ID Number** : 221020518053
- C. Thesis Title** : **Legal Interpretation of the Constitutional Court Regarding the Absence of Regulations on Terminating Investigations in Act Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.**
- D. Number of Page** : 10 pages and 97 pages
- E. Abstract Contents** :
- F.** *Act of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law does not regulate the termination of investigations. The problems of this research are: (1) what are the legal facts of the Constitutional Court's decision in Decision No. 53/PUU-XIX/2021 and Decision No. 4/PUU-XX/2022 regarding the absence of provisions for terminating investigations; and (2) what is the legal interpretation of the Constitutional Court in its considerations and decisions regarding the absence of provisions for stopping investigations based on Decision No. 53/PUU-XIX/2021 and Decision No. 4/PUU-XX/2022. This research also aims to analyze and find out: (1) the legal facts of the Constitutional Court's decision in Decision No. 53/PUU-XIX/2021 and Decision No. 4/PUU-XX/2022 regarding the absence of regulations for stopping investigations; and (2) the legal interpretation of the Constitutional Court in its considerations and decisions regarding the absence of provisions for stopping investigations based on Decision No. 53/PUU-XIX/2021 and Decision No. 4/PUU-XX/2022. The method used is a type of normative legal research with statutory, conceptual and case approaches, which are analyzed qualitatively. The results of this research conclude: (1) Constitutional Court Decision No. 53/PUU-XIX/2021 and Constitutional Court Decision No. 4/PUU-XX/2022 are cases which respectively materially test the norms in Article 77 letter a and Article 5 paragraph (1) letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, both of which were rejected in their entirety by the Judge; and (2) Judges in Decision No. 53/PUU-XIX/2021 and Decision No. 4/PUU-XX/2022 used 3 (three) theories of legal interpretation, namely historical legal interpretation, teleological legal interpretation, and holistic thematic-systematic legal interpretation. then determine that the absence of arrangements for stopping the investigation is in accordance with the values of justice and legal certainty.*
- G. Keywords:** *legal interpretation, criminal procedural law, investigation*
- H. References** : 27 Books, 3 Legislations, 4 Court Decision, 9 Journal, 1 Disertation, and 1 Website
- I. Lecture Name Supervisor** : Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas akhir ini, penulis memilih dan merumuskan tesis dengan judul: **“PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan Tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis sangat menerima saran dan kritik dari semua pihak, guna menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini maka Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa haru serta bangga kepada Universitas Nasional dan khususnya kepada Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mendapat pengalaman yang berharga. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;

2. Yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Universitas Nasional;
3. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasiona; yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan mendukung proses penyusunan tesis ini secara tulus dan terbuka;
4. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing Tesis yang tak henti-hentinya membimbing, memberi ilmu dan memotivasi Penulis agar dapat menyelesaikan penelitian tesis ini;
5. Yang amat terpelajar, Ibu Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing Tesis yang juga senantiasa membimbing, memberi ilmu dan memotivasi Penulis agar dapat menyelesaikan penelitian tesis ini;
6. Yang amat terpelajar Bapak dan ibu Sekretariat Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional
7. Yang amat terpelajar, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen kami pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, yang telah pula membimbing, memberikan pengajaran dan membagi pengalaman kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;

8. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional;
9. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi yang tiada henti dan doa bagi Penulis.
10. Tak lupa kepada kedua orang tua Penulis yakni Bapak Semmy Lochman dan Ibu Vitri Agustini turut memberikan semangat, dan mendukung bagi Penulis untuk menyelesaikan studi.
11. Begitu pun rasa terima kasih dan bangga tak lupa Penulis haturkan kepada para sahabat dan rekan-rekan lain yang Namanya tak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang juga telah mendukung, memberi energi, dan inspirasi bagi Penulis.

Akhir kata, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semua kebaikannya sehingga penelitian Tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Jakarta, 22 Februari 2024



Rivo Alfajri Syah Virdan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Orisinalitas Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Kerangka Teori.....	19
B. Kerangka Konseptual	31
BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XIX/2021 DAN PUTUSAN NOMOR 4/PUU-	

**XX/2022 TENTANG KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN
PENYELIDIKAN**

A. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XIX/2021	43
B. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-XX/2022	53
C. Fakta Hukum Putusan Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022 Kaitannya dengan Ketentuan Ketiadaan Penghentian Penyelidikan	62

**BAB IV PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA**

A. Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 53/PUU-XIX/2021	64
B. Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------